

KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Imron Arifin

Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Kota Malang Jawa Timur
E-mail: imronarifinum@gmail.com

Abstrak: Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan akselerasi kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. Kerjasama ini bertujuan terciptanya pasar tunggal dan basis produksi yang memiliki kebebasan aliran barang, jasa, investasi, sumber daya manusia terampil dan perpindahan barang modal. Kerjasama ekonomi ini mempengaruhi seluruh sektor kehidupan termasuk bidang pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran pada satuan pendidikan memiliki tanggungjawab untuk berkolaborasi dengan dua sisi perubahan pendidikan, penyelarasan dengan kebutuhan MEA dan Globalisasi, sekaligus melestarikan karakteristik kebangsaan melalui pendidikan karakter yang berbasis pada *local wisdom* guna melestarikan jati diri bangsa yang berperadaban.

Kata kunci: kepemimpinan pembelajaran, pendidikan karakter, Masyarakat Ekonomi ASEAN

Abstract: The AEC is the accelerated economic cooperation ASEAN countries were fully integrated into the global economy. This cooperation aims at the creation of a single market and production base that has the free flow of goods, services, investment, skilled human resources and the transfer of capital goods. Economic cooperation is affecting all sectors of life including education. The principal as instructional leader in the educational unit has a responsibility to collaborate with the two sides of educational change, alignment with the needs of MEA and globalization, while preserving the characteristics of nationality through character education based on local wisdom in order to preserve the identity of a civilized nation.

Keywords: instructional leadership, character education, AECC

Indonesia terlibat aktif dalam pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Setiap penyelenggaraan KTT ASEAN, Indonesia senantiasa hadir dan berpartisipasi aktif mengikuti pertemuan negara-negara ASEAN. Pada tahun 2003 diselenggarakan KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia. Dalam KTT tersebut disepakati terbentuknya AEC (ASEAN *Economic Community*) yang kemudian dikenal sebagai MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang bertujuan tercipta pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN. Di lingkungan negara-negara ASEAN akan terjadi kebebasan aliran barang, jasa, investasi, sumber daya manusia yang terampil dan perpindahan barang modal.

Pada tahun 2012, KTT ASEAN ke-12 diselenggarakan di Cebu. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan *Declaration on the acceleration of the establishment of an ASEAN community by 2015*. Berdasarkan deklarasi Cebu, implementasi AEC atau MEA yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 dipercepat pada tahun 2015. Tepat pada tanggal 31 Desember 2015, AEC diterapkan. Sebelumnya, pada 27 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo telah pula menyetujui kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam Trans Pacific Partnership (TPP) sebagai perdagangan bebas Asia-Pasifik (Arifin, 2015).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economy Community (AEC) memiliki lima pilar, yaitu: (1) aliran bebas barang (*free flow of goods*); (2) Aliran bebas jasa (*free flow of service*); (3) aliran bebas investasi (*free flow of investment*); (4) aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*); dan (5) aliran bebas modal (*freeflow of capital*). Berdasarkan kelima pilar tersebut maka seluruh anggota MEA akan menuju: (1) *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal); (2) penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM); (3) suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan (4) integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Penerapan MEA akan menampilkan dunia baru ASEAN yang mempengaruhi bukan hanya ekonomi global, tetapi juga di bidang sosial, budaya, politik, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan bertujuan mempersiapkan sumber-sumber daya manusia sekarang dan masa depan yang mampu menjawab tantangan jaman dan perubahan global dengan tetap memiliki jati diri kebangsaan agar tidak terlindas arus global. Penyiapan sumber-sumber daya melalui pendidikan inilah peran kepala sekolah dan guru menjadi sangat determinan dan pilar utama pendidikan. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi pada satuan pendidikan memiliki peran ganda yaitu sebagai *educational leader* dan *manager of school* (Sergiovanni, 2000). Penelitian Austin (dikutip Sergiovanni, 2000) menemukan bahwa sekolah yang capaian muridnya tinggi memiliki kepala sekolah yang terlibat dalam program pembelajaran di banding dengan kepala sekolah yang tidak terlibat langsung. Sejalan dengan itu Rutter (dikutip Sergiovanni, 2000) dalam penelitiannya menemukan

bahwa kepala sekolah merupakan kunci kesuksesan bagi peningkatan kualitas keluaran peserta didik.

Bafadal (2016) memaparkan pengalaman sebagai Direktur Pembinaan SD Kemdikbud, ketika melakukan uji kompetensi kepala sekolah pada tahun 2015, dari 856 kepala sekolah dari seluruh wilayah Indonesia hanya ditemukan 16% kepala sekolah yang melaksanakan peran kepemimpinan pembelajaran, selebihnya banyak menjalankan peran lain, baik sebagai manajer sekolah atau mengurus masalah administrasi dan sarana-prasarana pendidikan.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Kepala Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan bagian integral dari organisasi formal yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemimpin yang memiliki posisi sebagai kepala sekolah (Bass, 1981: 7). Kepala sekolah merupakan jabatan formal bagi pemimpin sebuah sekolah, baik pada pendidikan anak usia dini (PAUD, *Early Childhood Education*, ECE) , maupun pendidikan dasar dan menengah, yang memiliki posisi ini disebut kepala sekolah atau *School Principalship*, (Kimbrough & Burkett, 2003). Berkaitan dengan posisi ini, Davies (2000: 48) menyebutkan: “*A school principal occupies a key position in the schooling system.*”

Di negara-negara maju kepala sekolah mendapat sebutan bermacam-macam. Ada yang menyebut guru kepala (*head teacher* atau *head master*), kepala sekolah (*principal*), kepala sekolah yang mengajar (*teaching principal*), kepala sekolah pensupervisi (*supervising principal*), direktur (*director*), administrator (*administrator*), dan atau pemimpin pendidikan (*educational leadership*, Arifin, 2008).

Penyebutan yang berbeda ini, menurut Mantja (dikutip Arifin, 2008) disebabkan adanya kriteria yang mensyaratkan kompetensi profesional kepala sekolah. Sebagai Administrator (*School Administrator*), kepala sekolah harus mampu mendayagunakan sumber yang tersedia secara optimal. Sebagai manajer (*Manager of Schools*), kepala sekolah harus mampu bekerja bersama dan melalui orang lain dalam organisasi sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan (*Educational Leader*), kepala sekolah harus mampu mengkoordinasi dan menggerakkan semua potensi manusia untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sebagai supervisor (*School's Supervisor*) kepala sekolah wajib membantu

guru (*to help teacher*) meningkatkan kapasitasnya untuk membelajarkan murid secara optimal.

Sedangkan Wahjosumidjo (1999: 83) sendiri mengartikan bahwa kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah pada Bab I pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).

Kepemimpinan Kepala Sekolah Efektif

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif (*Effective Principal*) sangat menentukan kesuksesan sekolah (*successful school*). Menurut penelitian Lipham (2003) sekolah-sekolah yang efektif atau sukses hampir selalu ditentukan kepemimpinan kepala sekolah. Blumberg dan Greenfield (2002) menyatakan bahwa kepala sekolah tidak hanya memberi layanan saja, melainkan juga memelihara segala sesuatunya secara lancar dan terus-menerus dengan “memelihara kerukunan”, ia mencurahkan waktu dan energi secara intelek dan emosional untuk memperbaiki sekolah. Haycock (2008) menyatakan: “*leadership is not about one person, it’s about building a shared commitment and building a leadership team*”. Kepala sekolah merupakan sosok unik yang bersama timnya mencapai tujuan sekolah secara efektif. Menurut Kimbrough dan Burkett (2003) kepala sekolah yang efektif ditandai dua hal. Pertama, ber-*image* tentang apa yang dapat dilakukannya. Kedua, memberi arahan, dorongan, dan ketrampilan untuk membuat perkiraan *image* sebenarnya. Oleh karena itu, kajian tentang kepemimpinan kepala sekolah yang efektif pada sekolah unggul menjadi perhatian para peneliti. Salah satu keunggulan sekolah sangat ditentukan oleh kesuksesan kepala sekolah dalam menerapkan nilai, norma, spiritualitas, dan etika sebagai basis pendidikan karakter (Arifin, 2010b; Mulyadi, 2010; Mulyasa, 2012).

Kepemimpinan Pembelajaran Kepala Sekolah

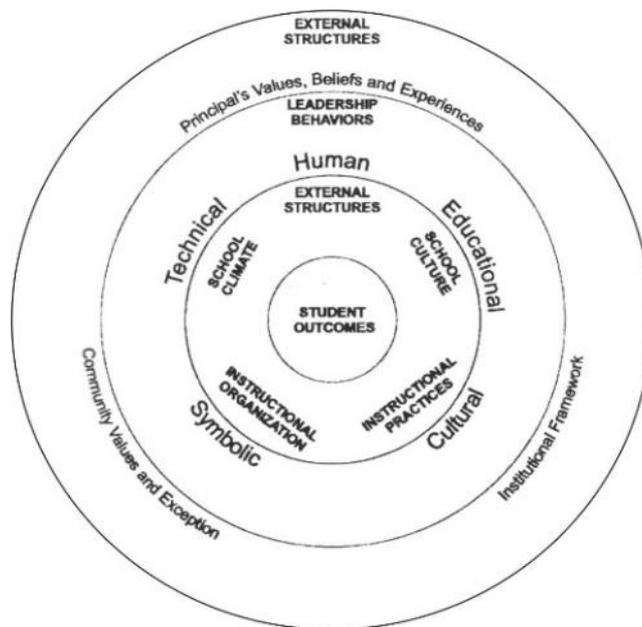
Kepala sekolah merupakan jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh sembarang orang tanpa didasarkan atas pertimbangan tertentu. Siapa pun yang akan diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan tertentu seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, kompetensi, pangkat dan integritas. Oleh sebab itu, kepala sekolah pada hakikatnya adalah pejabat formal sebab pengangkatannya melalui suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku (Arifin, 2010).

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi (*influencing*), mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guru, siswa, orang tua siswa dan pihak lain yang terkait untuk bekerja/berperan serta guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini berarti kepala sekolah merupakan jabatan pimpinan, yaitu tenaga fungsional guru yang diberi tugas dan tanggung jawab serta mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama (Arifin, 2009).

Sedangkan kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*) merupakan kepemimpinan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pengajaran dalam sistem pembelajaran (Husein, 1993). Menurut Keefe dan Jenkins (1984), juga David dan Thomas (1989) bahwa peranan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah adalah dalam memberi arah, sumber dan bantuan kepada guru dan siswa untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran (*how to improve teaching and learning for student*). Tepat yang disampaikan Ubben dan Hughes (1992) pemimpin pembelajaran merupakan tindakan pada pembelajaran langsung (*direct intructional*) maupun tidak langsung (*indirect instructional*) yang mengarah pada upaya peningkatan kemajuan belajar anak didik.

Menurut Ubben dan Hughes (1992) kepemimpinan pembelajaran yang efektif memiliki lima ciri utama: (1) mengordinasi program pembelajaran, (2) menekankan prestasi, (3) mengevaluasi kemajuan anak didik secara teratur, (4) menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan (5) menyusun strategi pembelajaran. Selanjutnya, Ubben dan Hughes (1992) mengajukan model kepemimpinan pembelajaran yang memiliki empat rangkaian kekuatan yang dapat mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa, yaitu: (1) struktur eksternal yang meliputi lingkaran harapan, nilai, keyakinan yang mempengaruhi perilaku dan kemampuan kepemimpinan pembelajaran, Lingkaran yang menunjukkan perilaku dan kemampuan pemimpin pembelajaran, (2) lingkaran yang menunjukkan

perilaku dan kemampuan pemimpin pembelajaran, (3) struktur internal yang diciptakan pemimpin dan pendidik dengan target akhir pencapaian tujuan final berupa hasil belajar atau lulusan, dan (4) lingkaran hasil belajar (*outcome of learning*) dan lulusan (*student outcomes*). Hasil lulusan akan memberikan umpan balik pada harapan, nilai dan keyakinan pada pemimpin, lembaga dan masyarakat.



Gambar 1. Model kepemimpinan Pembelajaran (Ubben & Hughes, 1992)

Kepala Sekolah Berbasis Budaya Karakter

Kepala sekolah memiliki peranan sangat penting dalam membangun karakter siswa di sekolah, terutama dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah. Untuk itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan prakarsa implementasi dalam membangun karakter siswa. Oleh karena itu, dalam implementasi pendidikan karakter kepemimpinan kepala sekolah perlu, mendapat perhatian secara serius.

Menurut Mulyasa (2010) selain kepala sekolah harus mampu memobilisasi sumber daya sekolah, kepala sekolah harus juga harus mampu: (1) membuat perencanaan dan evaluasi, (2) pengembangan kurikulum, (3) pengembangan pembelajaran, (4) pengelolaan ketenagaan, (5) pengelolaan sarana dan sumber belajar, (6) pengelolaan keuangan, (7) pelayanan terhadap siswa, (8) hubungan sekolah dengan masyarakat, dan (9) penciptaan iklim sekolah.

Sosok kepala sekolah yang berkarakter perlu dimiliki dan diperhatikan agar bawahannya setia kepadanya. Menurut Tjiptono (dalam Arifin, 2010), kepala sekolah harus menunjukkan sikap-sikap kepribadian sebagai berikut. (1) memiliki rasa tanggung jawab yang besar, (2) memiliki disiplin pribadi yang tinggi, (3) memiliki sifat jujur, (4) memiliki kredibilitas yang tinggi, (5) mendahulukan akal sehat (*common sense*), (6) memiliki energi dan stamina tinggi, (7) memegang teguh komitmen, (8) memegang teguh komitmen terhadap tujuan organisasi, (9) memegang teguh komitmen terhadap perkembangan pribadi dan profesionalitas, dan (10) memiliki kesetiaan dan ketabahan dalam menghadapi segala situasi.

Kepala Sekolah merupakan kunci sukses dalam pengembangan budaya sekolah, budaya mutu, yang berujung pada budaya karakter. Hal ini telah dikemukakan Owens (dalam Imron, 2013:7) bahwa kepala sekolah memiliki pengaruh kuat dalam membangun budaya sekolah (*the strong school cultures*), ia menjelaskan. *School leadership who would strong organization cultures in school spend time articulating the purpose and the mission of the school, they socialize others to these values, they define and redefine in the uniqueness of the school, they develop system of symbol that reinforce the uniqueness and make sure that the symbols are highly visible, they reward those who accept and reflect the norm and values of the school.*

Kebutuhan kepala sekolah berkarakter di Indonesia pada dasarnya telah tertuang pada Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Kepala Sekolah/Madrasah. Dalam Permendiknas disebutkan bahwa kepala sekolah harus memiliki lima kompetensi dasar, yaitu: kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Pada kompetensi kepribadian (*personality competence*) disebutkan indikator pencapaiannya meliputi: (1) berakhlak mulia, dengan mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah; (2) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin; (3) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah; (4) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi; (5) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah; dan (6) memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan (Permendiknas No. 13/2007).

Kepemimpinan kepala sekolah berkarakter selain terkait dengan kompetensi kepribadian juga sosial (*social competence*) dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah dan luar sekolah (Alma, 2008), kepala sekolah berusaha

mengembangkan komunikasi dengan orang tua, siswa, warga sekolah, sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan (Wibowo, 2014), berkesinambungan, sehat, positif, komunikatif dan konstruktif (Arifin, 2010). Kompetensi sosial kepala sekolah ditandai: (1) terampil bekerja sama dengan orang lain yang saling menguntungkan dan bermanfaat; (2) mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan (3) memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain (Permendiknas No. 13/2007).

Arifin (2010, 2011) menambahkan bahwa selain lima kompetensi yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dapat dikembangkan kompetensi lain yang relevan seperti kompetensi spiritual (*spiritual competence*) yang ditandai dengan dimensi spiritual trasendental berupa keimanan, ketaqwaan, dan nilai *religion commitment* lainnya, kompetensi ini dibutuhkan pada sekolah-sekolah keagamaan, madrasah, dan pendidikan di lingkungan pondok pesantren. Dengan kata lain, kepala sekolah bukan sekedar memiliki kompetensi kepribadian dan sosial, tetapi kompetensi-kompetensi dimaksud didasari ketaqwaan, sehingga menjadi *kesalehan pribadi* dan *kesalehan sosial*, mungkin juga *kesalehan kultural*, *kesalehan ekonomi*, dan *kesalehan kebangsaan*. Kesalehan dimaksud sebagai landasan spiritual, hal mana sesuai dengan makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.

Inti dari kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter adalah kepemimpinan yang mengembangkan warga sekolah utamanya potensi peserta didik sebagai pembelajar yang baik (*good knower*) yang selalu terikat dalam berfikir (*fikir*), merasakan (*dzikir*) dan bertindak (*fi'il*) terhadap nilai-nilai kebaikan, *values of goodness*. Lebih dari itu untuk lingkungan pendidikan Islam tentu menjadi basis *spiritual-goodness* yang biasanya dikenal di lingkungan pesantren, madrasah, diniyah, dan sekolah Islam dengan materi aqidah-akhlak. Bagaimana aqidah-akhlak ini tidak hanya berhenti pada *knowing*, tapi juga menjadi *feeling* dan *action*. Strategi paling efektif adalah mengajar dengan “keteladanan dan inspirasi berbasis moral atau karakter dan diawali oleh kepala sekolah sebagai *inspiring leader*” (Arifin, 2010).

Kepemimpinan Pembelajaran Kepala Sekolah di Era MEA

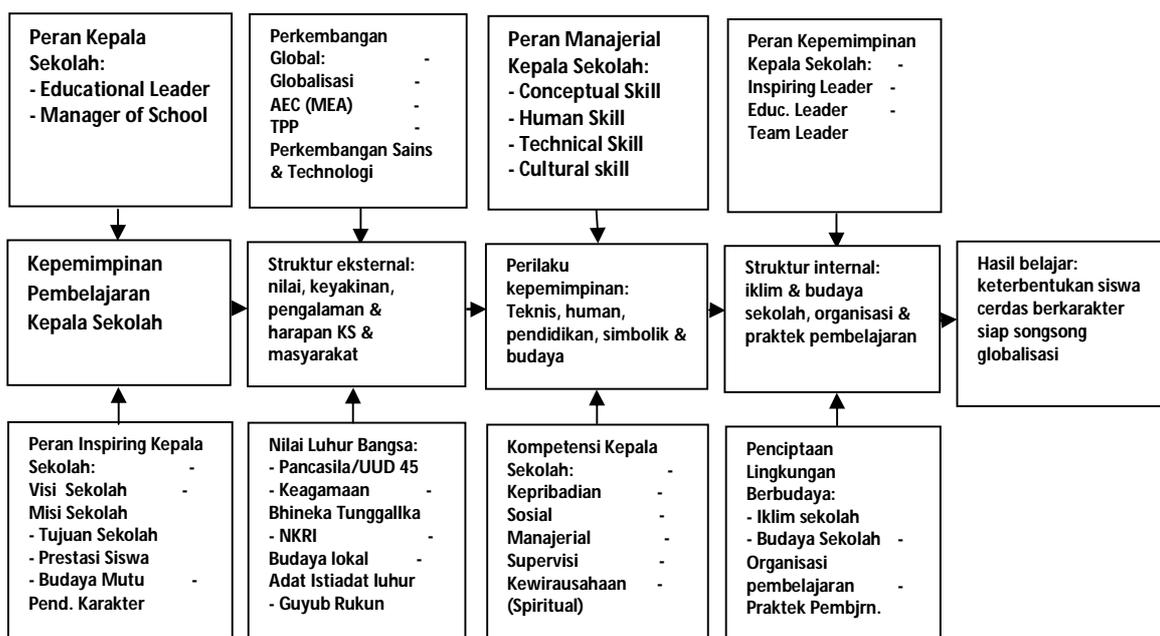
Kepemimpinan pembelajaran pada masa MEA dan globalisasi mempertimbangkan tiga aspek penting. Pertama, perkembangan global dengan segala perubahan di masa sekarang dan akan datang, termasuk tuntutan dan dampak MEA bagi Indonesia. Kedua, konservasi nilai, filosofi, dan ideologi jati diri bangsa berbasis *local wisdom* melalui

pendidikan karakter. Ketiga, strategi kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah menginspirasi dan membangun tim dalam pendidikan karakter. Tiga aspek ini menjadi tujuan pendidikan pada era MEA dan globalisasi yaitu pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat, yaitu “*intelligence plus character.....that is the goal of true education*” (Suyanto, 2010).

Menurut Zubaidi (2011) bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*) dan tindakan (*action*). Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, akan menghasilkan siswa (*outcome of learning*) yang cerdas emosi (*emotional intelligence*), cerdas sosial (*social intelligence*), cerdas keagamaan (*spiritual intelligence*), cerdas fisik (*physical intelligence*), cerdas budaya (*cultural intelligence*), dan cerdas pengetahuan (*knowledge intelligence*).

Menurut Sulthon (2012) bahwa nilai-nilai karakter yang diharapkan bisa terbentuk yaitu. (1) jujur (religius, adil, ikhlas, berfikir positif), (2) cerdas (kreatif, mengendalikan diri, rendah hati, hemat), (3) tangguh (mandiri, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, pantang menyerah), dan (4) peduli (kasih sayang, toleransi, santun, cinta damai, kerjasama dan cinta tanah air).

Untuk mencapai keterlaksanaan kepemimpinan pembelajaran dalam membentuk karakter di era MEA, maka pemimpin pembelajaran bisa mempertimbangkan: (1) aspek tuntutan dan dampak globalisasi dan MEA; (2) nilai-nilai luhur bangsa Indonesia; (3) struktur eksternal berdasarkan pengalaman, keyakinan, harapan dan nilai kepala sekolah dan masyarakat serta kerangka pembelajaran; (4) perilaku kepala sekolah terkait dengan teknik, *human*, pendidikan, simbolis, dan budaya; (5) struktur internal dengan membangun iklim sekolah, budaya sekolah, organisasi pembelajaran, dan praktek pembelajaran; (6) mempertimbangkan peran dan kompetensi kepala sekolah; (7) strategi implementasi pendidikan karakter; dan (8) merencanakan, memantau dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Delapan aspek dari keterlaksanaan kepemimpinan pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan karakter dengan memperhatikan aspek tuntutan dan dampak MEA dan globalisasi, serta pelestarian nilai-nilai luhur bangsa yang tergambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kepemimpinan Pembelajaran Kepala Sekolah dalam Pendidikan Karakter

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan dan perkembangan yang pesat dalam iklim globalisasi dan terbentuknya MEA atau AEC, telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, pendidikan, dan keagamaan. Perubahan ini membawa dampak positif berupa pensinergian negara-negara ASEAN menghadapi globalisasi pada satu sisi, tetapi juga dampak negatif pada tingkat kompetisi dan pengaruh lainnya pada aspek nilai, filosofi, dan ideologi yang membuka peluang bagi bangsa Indonesia menghadapi krisis multi dimensi yang didalamnya terjadi kemerosotan nilai-nilai moral, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai spiritual, sebagai akibat dari adanya *ethical malaise* atau *ethical crisis*. Drucker (1990) menyatakan bahwa bahaya kehidupan yang dihadapi oleh semua bangsa adalah lahirnya masyarakat *barbar* yang terdidik, Darmaningtyas (2007) menyebutnya pelaku kejahatan yang intelek dengan sebutan preman berdasi, artinya para pelaku kriminal yang terpelajar. Kanungo dan Mendocca (1996) juga mengatakan bahwa masyarakat kita telah kehilangan kepercayaan akan nilai-nilai dasar ekonomi kita, dan karena itu perlu kelahiran kembali moral-spiritualitas dalam kepemimpinan dan pendidikan kita.

Sejalan antara ungkapan para ahli di bidang pendidikan dibutuhkan pemimpin pembelajaran yang kuat (*the strong instructional leader*) yang mampu mensinergikan

unsur-unsur positif dalam pembelajaran dan mereduksi unsur-unsur negatif yang secara persuasif mempengaruhi perilaku anak bangsa terbelokkan dari jati diri bangsa, pengaruh negatif globalisasi seperti siswa yang melakukan demoralisasi, asusila, *bullying*, dan vandalisme pelajar yang masih menjadi momok bagi bangsa dan calon generasi bangsa, sehingga bangsa Indonesia sekarang dan di masa depan membutuhkan pembangunan karakter (*character building*) dalam pendidikan dan kepemimpinan dengan diimbangi pendidikan berciri karakter dan kepemimpinan pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa membentuk siswa berkarakter tentu efektif bilamana diberikan pada konteks pendidikan, melalui iklim sekolah, kultur sekolah, organisasi dan praktek pembelajaran yang diberikan melalui intervensi kegiatan belajar-mengajar, pengintegrasian dalam kegiatan ekstra kurikuler, penciptaan budaya sekolah, dan pembiasaan di rumah dan masyarakat yang kondusif. Misi besar dalam pendidikan karakter akan tercapai efektif melalui kunci kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah yang kuat melalui *inspiring leader*, *educational leader*, dan *team leader*. Pemimpin pembelajaran inilah yang akan mensinergikan potensi *dzikir* (hati), *fikir* (intelektual), dan *fi'il* (perilaku) secara harmoni dan terorkestrasi dalam perilaku kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan berkehidupan global. Ruh dari kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran menjadi kunci dari kesuksesan pendidikan karakter menghadapi globalisasi, MEA atau apapun perubahan dunia. Tentu melaksanakan konsep dimaksud tidaklah mudah, sebab dibutuhkan keteladanan kepemimpinan kepala sekolah dan semua pihak dengan penciptaan budaya berkarakter di lingkungan sekolah-rumah-masyarakat.

Disarankan kepada para kepala sekolah agar bertumbuh komitmen dalam mengimplementasikan peran kepemimpinan pembelajaran karena kunci keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh *the strong instructional leader*. Kepada pemerintah agar ada sosialisasi dan pembinaan kepala sekolah untuk lebih mengenal, menghayati dan melaksanakan peran kepemimpinan pembelajaran bagi para kepala sekolah melalui berbagai kegiatan pembinaan profesional atau forum ilmiah dan supervisi. Bagi para peneliti agar memperhatikan masalah peran kepemimpinan pembelajaran sebagai topik karena masih banyak ditemukan kepala sekolah yang belum menjalankan peran ini secara maksimal dan belum banyak dikaji para peneliti.

DAFTAR RUJUKAN

- Alma, B. 2009. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Andang. 2014. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah: Konsep, Strategi, dan Inovasi Menuju Sekolah Efektif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arifin. I. 2010. *Kepemimpinan dan Pendidikan Berbasis Karakter di Indonesia*. Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana & Pascasarjana IKAHA Jombang, 31 Oktober 2010.
- Arifin. I. 2008. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Sekolah Berprestasi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Arifin. I. 2009. *Kepemimpinan Kepala PAUD dalam Inovasi Pembelajaran Sentra*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Bafadal, I. 2016. *Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kepemimpinan Pembelajaran*. Materi Talk Show Peningkatan Mutu Pendidikan di Jawa Timur. Malang: Universitas Negeri Malang, 23 Pebruari.
- Bass, B.M. 1981. *Stogdill's Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research*. New York: The Free Press.
- Blumberg, A., & Greenfield, W. 2002. *The Efective Principal: Perspective on School Leadership*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Darmaningtyas (2007). *Pendidikan pada Masa dan Setelah Krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davies, L. 2000. *Effective School and Effective Teachers*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Drucker, P. (1990). *Managing the non-profit organization*. New York: Harper Collins.
- Kanungo, R.N., & Mondonca, M. (1996). *Ethical Dimension of Leadership*. London: SAGE
- Lickona, T. 1996. Teaching respect and responsibility. *Reclaiming Children and Youth*. Vol. 5 No. 3, pp. 143-151. Dalam <http://www.cyc-net.org/cyc-online/cycol-0240-lickona.html>.
- Lickona, T. 2004. *Character Matters*. New York: Touchstone Rockefeller Center.
- Mulyadi. 2010. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mulyasa, E. 2014. *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Rosdakarya.
- Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

- Sergiovanni, T.J. 2000. *The Principalship: A Reflective Practice Perspective*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Ubben, G.C., & Hughes, L.W. 1992. *The Principal: Creative Leadership for Effective School*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Usman, H. 2010. Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah di Abad ke-21. *Jurnal Tenaga Kependidikan*. Vol. 5. No. 2, Agustus 2010
- Wahjosumidjo. 1999. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wibowo, A. 2014. *Manager & Leader: Sekolah Masa depan: Profil Kepala Sekolah Profesional dan Berkarakter*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.